

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran lembaga keuangan sangat penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Dalam menumbuhkan sektor ekonomi, lembaga keuangan memberikan pengaruh penting didalamnya. Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah perbankan, *Building Society*, *Credit Union*, pialang saham, asset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun dan bisnis serupa lainnya. Saat ini lembaga keuangan atau lembaga perbankan yang ada dimasyarakat diantaranya bank setral, bank umum, lembaga pembiayaan pembangunan, lembaga perantara penerbit dan penjualan surat-surat berharga, perusahaan asuransi, PT Penggadaian, koperasi kredit dan lembaga keuangan lainnya.

Beberapa wilayah di Indonesia telah mengembangkan lembaga keuangan lokalnya masing-masing, beberapa diantaranya yaitu Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Lumbung Pitih Nigiri (LPN) di Sumatra Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang didirikan pada tahun 1984 (Sadiartha, 2017). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga ekonomi desa yang berguna sebagai

tempat pengumpulan dana, pemberian kredit, serta sumber pembiayaan dalam pembangunan di wilayah desa yang ada di Bali.

Dalam menjalankan manajemennya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Desa Adat yaitu berdasarkan kekeluargaan dan dalam proses pelayanan jasa keuangannya dilakukan atas dasar prinsip saling percaya. Pemilihan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah Desa Adat. Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan warga yang berasal dari tiap banjar yang berada dalam satu desa adat, dan memiliki Badan Pengawas LPD Desa Adat yang terdiri dari seluruh Kelian Banjar di Desa Adat yang bersangkutan.

Pemilihan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) melalui Desa Adat tersebut menjadi salah satu kelemahan dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hal ini dikarenakan dalam perekrutan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini tidak melihat bagaimana latar belakang pendidikan yang dimiliki dari masing-masing calon pengurus. Dengan kata lain siapa saja yang mendapat suara terbanyak dapat menjadi pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hal ini yang menyebabkan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak berjalan dengan baik bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Berdasarkan data yang didapatkan pada Lembaga Pemerdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali Tahun 2017, Kabupaten Jembrana menduduki peringkat ke 2 LPD tidak sehat di Bali dengan presentase 8%. Hal ini disebabkan karena kondisi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di kabupaten Jembrana bervariasi.

Tabel 1.1
Presentase LPD Tidak Sehat di Bali

Kabupaten	Presentase
Badung	10%
Jembrana	8%
Gianyar	7%
Buleleng	5%
Bangli	4%
Klungkung	2%
Tabanan	1%
Karangasem	1%
Denpasar	0%

Sumber : LPLPD Provinsi Bali (2017)

Menilai dari suatu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diperlukan laporan keuangan yang baik dan lengkap. Keberhasilan manajemen dalam mengelola suatu entitas atau organisasi dapat tercermin dari laporan keuangan yang dihasilkan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban aktivitas perekonomian yang telah berlangsung dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi (Roviyantie, 2011). Maka dari itu setiap lembaga keuangan menginginkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh bendahara keuangannya berupa laporan keuangan yang berkualitas karena dapat berpengaruh bagi kemajuan lembaga keuangan itu sendiri.

Dari hasil audit yang dilakukan oleh Lembaga Pemerdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Jembrana dari 63 LPD yang ada, terdapat 56 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam kondisi sehat, 2 Lembaga Perkreditan

Desa (LPD) dalam kondisi cukup sehat, 2 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam kondisi kurang sehat, 3 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam kondisi tidak sehat.

Tabel 1.2
Hasil Audit Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se- Kabupaten Jembrana

No	Kecamatan	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat
1.	Pekutatan	12	0	1	0
2.	Mendoyo	16	1	0	1
3.	Jembrana	8	1	0	0
4.	Negara	9	0	1	0
5.	Melaya	11	0	0	2
Jumlah		56	2	2	3

Sumber : Lembaga Pemerdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) (2020)

Kecamatan Melaya menduduki peringkat pertama sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tidak sehat, karena dari 13 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Kecamatan Melaya, 2 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dinyatakan tidak sehat berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Lembaga Pemerdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Jembrana. Maju tidaknya sebuah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) salah satunya tergantung dari bagaimana kualitas laporan keuangannya. Kasus yang pernah terjadi di Kecamatan Melaya terkait dengan manipulasi laporan keuangan pernah terjadi di LPD Tuwed yang terbukti melakukan penyimpangan dana dengan memanipulasi laporan keuangannya dan menyebabkan kerugian pada LPD sebesar Rp 800 Juta (Anonim, 2019).

Teori keagenan (*agency theory*) muncul ketika pemegang saham mempekerjakan pihak lain untuk mengelola perusahaannya. Di LPD ini pengurus bertindak sebagai agen yang memiliki amanah atau tanggung jawab untuk

menyajikan laporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh pemberi amanah yaitu *principal*. Sehingga hubungan antara pengurus LPD dengan para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat dikaitkan adanya hubungan keagenan.

Aspek yang dapat mempengaruhi bagaimana laporan keuangan yang di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang menjadi perhatian peneliti yang pertama adalah *Locus Of Control*. *Locus Of Control* merupakan aspek yang ada dalam individu pegawai. Menurut Ghufron dan Risnawita (2011) *Locus Of Control* adalah gambaran pada keyakinan seseorang mengenai sumber penentu perilakunya. *Locus Of Control* merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan perilaku individu. Dua faktor yang mempengaruhi *Locus Of Control* yaitu faktor internal dan eksternal. *Locus of control* internal adalah keyakinan bahwa dalam dirinya tersimpan potensi besar untuk menentukan nasib sendiri. Orang dengan *locus of control* internal meyakini bahwa bukan takdir yang menentukan dirinya, tetapi apa yang ia jalani yang menentukan takdir. Sedangkan *Locus of control* eksternal adalah cara pandang dimana segala hasil yang didapat, baik atau buruk berada diluar kendali mereka. *Locus of control* eksternal lebih percaya pada factor seperti keberuntungan, kesempatan dan takdir. Hubungan *Locus of control* dengan kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *Locus of control* terhadap kualitas laporan keuangan.

Aspek kedua yang perlu diamati adalah pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan

Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.

Aspek ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud dalam hal ini adalah penggunaan internet dalam hal pemasaran dan dalam operasional usahanya. Menurut Thjay (2013) indikator pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu : Intensitas Pemanfaatan, Frekuensi Pemanfaatan dan Jumlah aplikasi atau *software* yang digunakan. Hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh I Putu Wikan Maha Karuniawan (2017) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A.A.Sg. Istri Pradnya Paramitha dan Ida Bagus Dharmadiaksa (2019) yang menyatakan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan LPD Kecamatan Denpasar Selatan. Namun lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Riedy Riandani (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di daerah Kabupaten Limapuluh Kota.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh I Putu Wikan Maha Karuniawan (2017) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Manusia, Penerapan Teknologi Informasi, dan *Locus Of Control* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng Barat. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu diantaranya : Pertama, terdapat 1 variabel independen yang diteliti berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia, sedangkan pada penelitian ini variabel independennya adalah pengelolaan keuangan. Kedua, terdapat perbedaan lokasi penelitian, pada penelitian sebelumnya dilakukan di LPD Kabupaten Buleleng Barat sedangkan pada penelitian ini dilakukan di LPD Kecamatan Melaya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh *Locus Of Control*, Pengelolaan Keuangan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Melaya**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan- permasalahan sebagai berikut :

1. Banyak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belum mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas.

2. Belum semua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik.
3. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belum semuanya memanfaatkan teknologi informasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar permasalahan menjadi jelas dan terpusat serta tujuan dapat dicapai, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti dengan menggunakan empat variabel yaitu *Locus Of Control*, Pengelolaan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Melaya.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu :

- 1.4.1 Bagaimana pengaruh *Locus Of Control* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Melaya?
- 1.4.2 Bagaimana pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Melaya?
- 1.4.3 Bagaimana pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Melaya?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh *Locus Of Control* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Melaya.
- 1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Melaya.
- 1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Melaya.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu teori di bidang yang berkaitan dengan penelitian sejenis terutama mengenai pengaruh *locus of control*, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi kesempatan untuk menambah wawasan berpikir, memperluas pengetahuan, baik pengetahuan pada teori,

maupun praktek. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Lembaga Perkreditan Desa sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan menerapkan pencatatan akuntansi secara baik dan benar sesuai dengan standar yang berlaku.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang bagaimana pentingnya penerapan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sehingga pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bacaan yang bisa dijadikan pedoman pada perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha.

